



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

RENCANA KERJA (RENJA-2024)



Jl. Tulip No. 2 Way Mengaku - Liwa - Lampung Barat
Telp. (0728) 21164 - Fax. (0728) 21164
Kode Pos 34811
2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 yang merupakan implementasi tahunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat mempunyai arti strategis karena Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja perangkat daerah setiap tahun. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui rencana kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen renja ini.

Liwa, 28 Februari 2023

KEPALABADAN

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



BURLIANTO EKA PUTRA, S.H.

NIP. 197109241998031005

DAFTAR ISI

<i>KATA PENGANTAR</i>	<i>i</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>ii</i>
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematikan Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	8
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	10
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	11
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	14
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	15
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	15
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	16
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	18
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	23
4.1. Rencana Kerja	23
4.2. Pendanaan Perangkat Daerah.....	28
BAB V PENUTUP.....	29
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah, sebagai implementasi dari pentahapan rencana strategis PD. Renja-PD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Renja-PD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Renstra-PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap perangkat daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) PD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada RPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sesuai amanat tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2024. Renja-PD merupakan dokumen rencana pembangunan PD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh PD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat merupakan rencana tahunan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah (PD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 2023 – 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat senantiasa menyesuaikan diri untuk selaras dengan dinamika dan perubahan yang terus berkembang di Kabupaten Lampung Barat. Pada satu sisi, perkembangan tersebut merupakan sebuah peluang yang dapat bermanfaat bagi pembangunan wilayah, Namun pada sisi lain sedikit banyak akan memunculkan berbagai permasalahan kompleks yang menuntut untuk dihadapi dan diselesaikan.

Permasalahan yang menjadi isu strategis yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat seperti :

1. Masuknya era globalisasi yang berpengaruh pada tatanan kehidupan masyarakat.
2. Menjelang dan pasca pelaksanaan pemilihan umum, baik itu pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan umum Legislatif dan pemilihan umum Presiden, serta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati, suhu politik di kalangan masyarakat, Ormas/LSM dan Partai Politik akan meningkat sehingga rentan terjadinya konflik/benturan-benturan antar kelompok masyarakat.
3. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kehidupan demokrasi terutama dalam hal penyampaian aspirasi seringkali menjurus pemaksaan kehendak, hal ini dapat menjadi potensi terjadinya konflik dan gejolak sosial.
4. Budaya politik yang dilandasi oleh moral dan etika politik masih perlu dimantapkan, sehubungan dengan adanya kecenderungan merosotnya moral dan etika dalam artikulasi politik baik di tingkat elite maupun massa, diwarnai dengan peningkatan perilaku agresif pada masyarakat, berupa penyampaian tuntutan dengan tuntutan dengan penggalangan massa, perusakan, main hakim sendiri dan kecenderungan meningkatnya pelanggaran terhadap tatanan kehidupan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kebebasan yang dinamik melalui momentum reformasi seakan berjalan tanpa arah, karenanya perlu di dayagunakan menjadi sumber daya kreatifitas dan sumber daya cipta yang positif, agar tetap mendukung eksistensi negara kesatuan yang demokratis dan bermuara pada tegaknya kedaulatan rakyat yang berkeadilan dan beradab.

Terkait isu-isu strategis tersebut, maka diperlukan adanya perencanaan program dan kegiatan secara terarah dan terpadu yang dapat memberi solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Khususnya Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, maka perencanaan program dan kegiatan dimaksud dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA)-PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024. Rencana Kerja (RENJA)-PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat ini merupakan dokumen perencanaan untuk menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024.

Dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 telah ditetapkan kinerja yang akan dicapai untuk seluruh indikator kinerja juga ditetapkan nilai kuantitatif yang dijadikan dasar pengukuran keberhasilan pada akhir periode pelaksanaannya. Rencana Kerja menjelaskan berkaitan antara kegiatan dan sasaran, kebijakan dengan programnya, dan keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja-PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.
13. Peraturan Badan Pembina Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun berdasarkan pada penjabaran program yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 sebagai dokumen perencanaan yang bersumber dari berbagai aspirasi yang ada.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 ini disusun dengan maksud :

2. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024.
3. Untuk menterjemahkan perencanaan strategis 4 (empat) tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.
4. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman dalam 1 (satu) tahun.

2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Renja ini adalah :

- a. Menetapkan program dan kegiatan organisasi yang sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, agar kegiatan pembangunan menjadi terpadu, terencana dengan baik, terarah dan efektif, mudah dipantau serta mudah diukur pencapaian hasilnya.
- b. Menetapkan indikator kinerja dan evaluasi serta analisis kinerja OPD agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat diketahui perkembangan dan hambatannya sehingga dapat ditetapkan solusi terbaik untuk mengatasinya.
- c. Sebagai salah satu indikator di dalam evaluasi kinerja aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah Kabupaten Lampung Barat;
- d. Sebagai salah satu bagian dari tindak lanjut pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

3.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 ini disusun ke dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
3. Program, Kegiatan dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023. Terkait dengan hal tersebut, Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat. Renja juga merupakan sebagai alat ukur menilai tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat pada Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan 6 (enam) program, 12 kegiatan dan 32 sub kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp. 4,806,098,727,- terdiri dari :

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2022 dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan Sub Kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 6 program, jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 12 kegiatan dan jumlah sub kegiatan termasuk sub kegiatan rutin sebanyak 32 sub kegiatan. Alokasi dana tahun 2022 untuk Belanja Daerah sebesar Rp. Rp. 4,806,098,727,- terealisasi sebesar Rp. Rp. 4,623,572,672,- atau 96,94 persen.

Dari seluruh sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat pada tahun anggaran 2022 secara umum telah realisasi fisiknya mencapai 100 persen dan rata-rata pencapaian indikator keluaran pada tahun 2022 adalah sebesar 95 persen.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja perangkat daerah. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengukuran kinerja mencakup Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja, dan tingkat pencapaian sasaran instansi yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Kriteria Capaian hasil Pengukuran Kinerja dengan klarifikasi/rentang dapat terlihat dalam table sebagai berikut :

NO	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	85% - > 100%	Sangat Berhasil
2	70% - 85%	Berhasil
3	55 % - 70 %	Cukup Berhasil
4	< 55 %	Tidak Berhasil

Hasil Pengukuran Kinerja antara Target dan Realisasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 dapat terlihat dalam tableberikut ini :

Hasil Pengukuran Kinerja antara Target dan Realisasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	TARGET	REALISASI BERDASARKAN KONDISI REAL
1	Menurunkan Konflik SARA	Persentase Penguranagn Konflik SARA	Jumlah konflik SARA yang ditangani / Jumlah konflik x 100%	100%	100%
2	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi	Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Pesta Demokrasi / Jumlah Masyarakat Yang Mempunyai Hak Pilih x 100%	- (86% Tahun 2024)	-
		Persentase Organisasi Masyarakat Yang Bermitra Dengan Pemerintah	Jumlah Ormas yang Aktif / Jumlah Ormas yang ada x 100%	5,26%	6,42%

Dari uraian tabel di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dapat dikategorikan “Cukup Baik”. Dengan demikian diharapkan di masa yang akan datang semua kegiatan yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik serta tetap memperhatikan unsur-unsur efektif dan efisien.

2.3. Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada tahun 2024 program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat difokuskan pada terciptanya kondusivitas wilayah dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Lampung Barat. Kondisi tersebut dapat menimbulkan potensi konflik disamping itu penguatan karakter melalui pendidikan wawasan kebangsaan dan Bela Negara serta pendidikan politik masyarakat sehingga yang dapat berkontribusi positif terhadap persatuan dan kesatuan wilayah sebagai bagian dari NKRI perlu dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

Berpedoman pada isu strategis yang terurai dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 – 2026, adalah sebagai berikut :

1. Masuknya era globalisasi yang berpengaruh pada tatanan kehidupan masyarakat.
2. Menjelang dan pasca pelaksanaan pemilihan umum, baik itu pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan umum Legislatif dan pemilihan umum Presiden, serta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati, suhu politik di kalangan masyarakat, Ormas/LSM dan Partai Politik akan meningkat sehingga rentan terjadinya konflik/benturan-benturan antar kelompok masyarakat.
3. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kehidupan demokrasi terutama dalam hal penyampaian aspirasi seringkali menjurus pemaksaan kehendak, hal ini dapat menjadi potensi terjadinya konflik dan gejolak sosial.
4. Budaya politik yang dilandasi oleh moral dan etika politik masih perlu dimantapkan, sehubungan dengan adanya kecenderungan merosotnya moral dan etika dalam artikulasi politik baik di tingkat elite maupun massa, diwarnai dengan peningkatan perilaku agresif pada masyarakat, berupa penyampaian tuntutan dengan tuntutan dengan penggalangan massa, perusakan, main hakim sendiri dan kecenderungan meningkatnya pelanggaran terhadap tatanan kehidupan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kebebasan yang dinamik melalui momentum reformasi seakan berjalan tanpa arah, karenanya perlu di dayagunakan menjadi sumber daya kreatifitas dan sumber daya cipta yang positif, agar tetap mendukung eksistensi negara kesatuan yang demokratis dan bermuara pada tegaknya kedaulatan rakyat yang berkeadilan dan beradab.

2.4. Review terhadap Rancangan awalRKPD

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 telah dilakukan reviu terhadap Rancangan Awal RKPD. Hal tersebut dilaksanakan agar Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat yang telah disusun selaras dengan Rancangan RKPD. Reviu dilaksanakan penyelarasan Tujuan, Sasaran Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dengan rincian hasil sebagai berikut :

1. Tujuan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat:
“Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat”
Indicator Tujuan : Indeks Kerukunan Hidup Umat Beragama

2. Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat:
 1. **Sasaran 1** : Menurunnya Konflik SARA.
Indikator kinerja sasaran yaitu Persentase Pengurangan Konflik SARA, target tahun 2024 sebesar 100%.

Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran tersebut menggunakan formulasi penghitungan yaitu:
$$\frac{\text{Jumlah potensi konflik SARA yang tidak menjadi peristiwa konflik SARA} \times 100\%}{\text{Jumlah Potensi Konflik SARA}}$$

 2. **Sasaran 2** : **Meningkatnya kesadaran politik masyarakat**
Dengan indikator :
 - 1) Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi, target pada tahun 2024 sebesar 86%.
Adapun formulasi penghitungan untuk mengetahui capaian kinerja sasaran adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Pesta Demokrasi} \times 100\%}{\text{Jumlah Masyarakat Yang Mempunyai Hak Pilih}}$$

- 2) Persentase Organisasi Masyarakat Yang Bermitra Dengan Pemerintah, target tahun 2024 sebesar 5,26%.

Adapun formulasi penghitungan untuk mengetahui capaian kinerja sasaran adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Ormasyangaktiv} \times 100\%}{\text{Jumlah Ormas Yang Ada di Kabupaten Lampung Barat}}$$

Berikut Review terhadap Rancangan Awal RKPD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat:

**REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Barat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,05 %	2,840,726,200,-	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Barat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,05 %	2,840,726,200,-	
2	Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Lampung Barat	Persentase pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	70 %	641,960,000,-	Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Lampung Barat	Persentase pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	70 %	641,960,000,-	
3	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Lampung Barat	Persentase kontribusi peran parpol dalam meningkatkan etika dan budaya politik masyarakat	72 %	2,105,634,000,-	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Lampung Barat	Persentase kontribusi peran parpol dalam meningkatkan etika dan budaya politik masyarakat	72 %	2,105,634,000,-	
4	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Lampung Barat	Persentase Organisasi Masyarakat yang Terdata dan Aktif	60 %	599,500,000,-	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Lampung Barat	Persentase Organisasi Masyarakat yang Terdata dan Aktif	60 %	599,500,000,-	
5	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Lampung Barat	Persentase menurunnya kasus penyakit masyarakat	72 %	1,524,500,000,-	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Lampung Barat	Persentase menurunnya kasus penyakit masyarakat	72 %	1,524,500,000,-	
6	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Lampung Barat	Persentase pencegahan konflik sosial di Kabupaten Lampung Barat	100 %	1,650,000,000,-	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Lampung Barat	Persentase pencegahan konflik sosial di Kabupaten Lampung Barat	100 %	1,650,000,000,-	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) diperoleh berbagai usulan terhadap kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan yang akan dijadikan rencana pembangunan Kabupaten Lampung Barat. Melalui forum tersebut akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat.

Berdasarkan hasil pelaksanaan Musrenbang yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada tingkat kecamatan diseluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat tidak terdapat usulan program kegiatan dari masyarakat yang masuk dan perlu tindak lanjut dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat sebagai lembaga teknis yang bertugas membantu Bupati Lampung Barat dalam hal merumuskan kebijakan teknis daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Lampung Barat agar dapat berjalan secara sinergi dan selaras dengan kebijakan nasional.

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKPD (rancangan awal).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mengatur keseluruhan sistem perencanaan pembangunan maka perencanaan pembangunan dituangkan dalam dokumen yang berkesinambungan, baik yang bersifat jangka panjang, menengah, maupun pendek atau tahunan. Secara makro, kinerja pembangunan nasional dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu : (i) pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi; (ii) peningkatan kesejahteraan rakyat; (iii) pengurangan kemiskinan; (iv) pengurangan tingkat kesenjangan antar daerah; (v) peningkatan kualitas hidup rakyat, khususnya pendidikan dan kesehatan; (vi) perluasan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Republik Indonesia Tahun 2024 adalah Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan arah kebijakan yaitu sebagai berikut :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan kualitas SDM : kesehatan dan pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan

6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sedangkan Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024 adalah Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kualitas SDM menuju Rakyat Lampung Berjaya dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
3. Pembangunan Infrastruktur
4. Reformasi Birokrasi
5. Kehidupan masyarakat yang religius, aman dan berbudaya
6. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dalam kaitan penetapan tujuan perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berlandaskan tujuan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 Kabupaten Lampung Barat yaitu Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Berbudaya, Aman dan Damai, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat menetapkan tujuan perangkat daerah sebagai berikut :

” Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat” dengan indikator Indeks Kerukunan Hidup Umat Beragama.

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Sedangkan yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing-masing). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencanastrategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dalam kurun waktu tahun 2022 – 2026, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

Sasaran 1 : Menurunnya Konflik SARA.

Indikator :Persentase Pengurangan Konflik SARA.
Dengan target pada tahun 2024 sebesar 100 %.

Sasaran 2 : Meningkatnya kesadaran politik masyarakat

Indikator : 1. Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti PestaDemokrasi.
Dengan target pada tahun 2024 sebesar 5,54 %.

2. Persentase Organisasi Masyarakat Yang Bermitra Dengan Pemerintah.
Dengan target pada tahun 2024 sebesar 5,54 %.

**Tujuan, Indikator Tujuan dan Target Jangka Menengah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-			
			2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	Indeks Kerukunan Hidup Umat Beragama	Sangat Baik (84,5)	Sangat Baik (84,10)	Sangat Baik (84,15)	Sangat Baik (84,20)

**Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN-			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	Menurunnya Konflik SARA	Persentase Pengurangan Konflik SARA	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi		86%		
			Persentase Organisasi Masyarakat Yang Bermitra Dengan Pemerintah	5,26%	5,54%	5.82%	6,09%

3.3. Program, Kegiatan dan SubKegiatan

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 antara lain :

**PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

SubKegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi kinerja perangkat daerah.

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- SubKegiatan :**
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- SubKegiatan :**
1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- SubKegiatan :**
1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

- SubKegiatan :**
1. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 4. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- SubKegiatan :**
1. Pengadaan Mebel
 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- SubKegiatan :**
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan :**
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 3. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM : PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTERKEBANGSAAN

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi Pancasila dan KarakterKebangsaan

- Sub Kegiatan :**
1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Kerakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinika Tunggal Ika dan SejarahKebangsaan.
 2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan SejarahKebangsaan.
 3. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

PROGRAM : PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK.

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,

Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

- Sub Kegiatan :**
1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
 2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik diDaerah.
 3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

PROGRAM : PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan PemantapanPelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

- Sub Kegiatan :**
1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing diDaerah.
 2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing diDaerah.
 3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing diDaerah.

PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA.

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

- Sub Kegiatan :**
1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
 2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
 3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
 4. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

PROGRAM : PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

- Sub Kegiatan :**
1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
 2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
 3. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja

Program merupakan kumpulan kegiatan dan sub kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam mengimplementasikan perencanaan pada penjabarannya dilakukan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan. Prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi perangkat daerah dalam merealisasikan perencanaan pembangunan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat melaksanakan fungsi kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah (sekda).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, memiliki rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 yang disusun berdasarkan ketentuan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan

dan Keuangan Daerah yang direncanakan akan melaksanakan 6 program, 13 kegiatan dan 44 sub kegiatan dengan dengan detail rencana kerja tahun 2024 sebagai berikut :

DETAIL SUB KEGIATAN TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	DETAIL KHUSUS SUBKEGIATAN TAHUN 2024
1	2	3
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan yaitu Renstra, Renja Tahun 2025
8.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tahun 2025
8.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD tahun 2024
8.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tahun 2025
8.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Tahun 2024
8.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2024
8.01.01.1.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan Evaluasi kinerja perangkat daerah Tahun 2024
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN Badan Kesbangpol Tahun 2024 sejumlah 14 orang
8.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Badan Kesbangpol Tahun 2024
8.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Badan Kesbangpol Tahun 2024
8.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol Tahun 2024
8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
8.01.01.1.05.09	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengadministrasian dalam rangka pengelolaan dan penyusunan kebutuhan barang milik daerah yang ada di Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Barat
8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
8.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Untuk kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang ada dilingkungan Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Barat
8.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi bagi Pegawai Badan Kesbangpol
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
8.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Badan Kesbangpol Tahun 2024
8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor Badan Kesbangpol Tahun 2024

1	2	3
8.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan SKHU kantor Badan Kesbangpol Tahun 2024
8.01.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan dan minuman tamu Badan Kesbangpol Tahun 2024
8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan anggaran untuk Perjalanan Dinas baik luar daerah maupun didalam daerah Tahun 2024
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
8.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas untuk operasional Badan Kesbangpol target sebanyak 2 unit
8.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebel untuk perlengkapan kantor Badan Kesbangpol
8.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin untuk menunjang kegiatan operasional Badan Kesbangpol
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
8.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas untuk operasional Badan Kesbangpol target sebanyak 2 unit
8.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebel untuk perlengkapan kantor Badan Kesbangpol
8.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin untuk menunjang kegiatan operasional Badan Kesbangpol
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan materai dan jasa pengiriman/ekspedisi
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kantor Badan Kesbangpol
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Badan Kesbangpol
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
8.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Badan Kesbangpol Tahun 2024
8.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya kantor Badan Kesbangpol
8.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung/bangunan kantor Kesbangpol
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Kerakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinika Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dilakukan terhadap 230 Orang peserta utusan Aparatur Pemerintah Pusat/Daerah, Aparatur Pekon, Tokoh Masyarakat, Organisasi Wanita, Organisasi Kemasyarakatan, Pemuda, Mahasiswa, Ormas Penggiat Pembangunan Pekon, Kader Pekon, di empat Kecamatan yaitu Batu Brak, Batu Ketulis, Gedung Surian, BNS Pembinaan dan Pemantapan idiologi pancasila dilakukan terhadap 270 orang peserta utusan Aparatur Pemerintah pusat/daerah, Aparatur Pekon, Tokoh Masyarakat, Organisasi Wanita, Organisasi Kemasyarakatan, pemuda, mahasiswa, Ormas penggiat pembangunan pekon, Kader pekon, di empat kecamatan yaitu ; Way Tenong, Kebun Tebu, Sumber Jaya, Sukau

1	2	3
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	<p>Pelatihan bela negara dilakukan 1 kali dalam satu tahun dengan peserta sebanyak satu pleton (31 orang)</p> <p>Sosialisasi dilakukan terhadap 100 Orang peserta yang terdiri atas Tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, aktivis gender, Guru, pemuda, pelajar/mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan Kecamatan Balik Bukit</p> <p>Diklat Diklat TOT dilakukan terhadap 120 Orang peserta yang terdiri atas Tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, aktivis gender, Guru, pemuda, pelajar/mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari di Kecamatan Balik Bukit</p>
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kegiatan ini merupakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhadap seluruh kegiatan dan sub kegiatan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.03	PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pemberdayaan Anggota Pemantau Pemilu/Tim Desk Pemilu dan Pilkada Tahun 2022 Kabupaten Lampung Barat untuk melakukan pemantauan pada masing-masing TPS sebanyak 991 orang (asumsi jumlah TPS sebanyak 991 berdasarkan data TPS pada Pemilu Tahun 2017)
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan kegiatan Koordinasi Forum Diskusi Politik pada pengurus partai politik yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Barat - Melaksanakan kegiatan sosialisasi undang-undang politik di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Barat - Melaksanakan kegiatan sosialisasi ke lembaga politik kepada pemilih pemula
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kegiatan berupa pemberian dana hibah kepada Partai Politik yang mempunyai wakil/kursi di DPRD Lampung Barat dan Hibah kepada lembaga penyelenggara/pengawas pemilu/pilkada
8.01.04	PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kegiatan yang dilaksanakan berupa penyusunan buku data base bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat sebanyak 100 eksemplar

1	2	3
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kegiatan yang dilakukan berupa pembinaan kepada pengurus dan anggota Ormas/LSM yang berada di Kabupaten Lampung Barat dan pemberian dana hibah kepada LSM/Ormas yang ada di Kabupaten Lampung Barat.
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kegiatan berupa monitoring dan evaluasi kepada Ormas/LSM/Masjid/Lembaga Pendidikan Swasta yang telah memiliki Surat Tanda Laport Keberadaan di Kabupaten Lampung Barat
8.01.05	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
8.01.05.2.01.01	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Penyusunan Bahan Perumusan dilaksanakan dalam bentuk kajian akademik dan pemetaan P4GN di Lampung Barat
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	<p>Pameran produk unggulan dilakukan dalam rangka Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII, pameran ini dilaksanakan 1 kali dalam setahun yang berlokasi TMII Jakarta</p> <p>Promosi Budaya dilakukan dalam rangka Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII, pameran ini dilaksanakan 1 kali dalam setahun yang berlokasi di anjungan Lampung TMII Jakarta</p> <p>Pagelaran seni dan budaya dalam rangka Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII, pameran ini dilaksanakan 1 kali dalam setahun yang berlokasi di anjungan Lampung TMII Jakarta</p> <p>Pembinaan Desa Bersinar (Desa bersih Narkoba) dilakukan terhadap 1 Pekon yang ditunjuk di Lampung Barat, dan 30 Kader P4GN Pekon yang ditunjuk. Pembinaan Desa Bersinar dilakukan selama 13 Bulan</p> <p>Sosialisasi Bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan sebanyak 5 kali yaitu : di Kec. Sumber Jaya, Kec. Way Tenong, Kec. Suoh, Kec. Belalau dan Kec. Sukau. Peserta sosialisasi sebanyak 500 Orang</p> <p>Deteksi dini penyalahgunaan narkotika (Tes Urine) dilaksanakan sekali dalam setahun dengan sasaran 600 ASN Pemda Lampung Barat</p>
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	<p>Deradikalisasi faham radikalisme dilakukan terhadap 20 orang yang terindikasi terpapar pemahaman radikalisme, Deradikalisasi dilakukan selama satu tahun anggaran, di dua Kecamatan yaitu Kec. Sukau dan Kec. Lumbok Seminung</p> <p>Sasaran pembinaan dilakukan secara bertahap terhadap 15 Pondok Pesantren diseluruh Kecamatan se Lampung Barat</p> <p>Rakor FKUB dilakukan sebanyak 3 kali, di Kec. Balik Bukit dengan peserta seluruh pengurus FKUB.</p> <p>Silaturahmi Lintas Agama dilaksanakan di Kecamatan Balik Bukit dengan sasaran 200 Orang utusan dari seluruh lima agama yang dianut penduduk Lampung Barat</p>

1	2	3
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kegiatan ini merupakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8.01.06	PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait kewaspadaan dini kepada para Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda di wilayah Kecamatan Air Jitam, Lumbok Seminung, Balik Bukit dan BNS
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Melaksanakan kegiatan monitoring dan pemantauan wilayah di Kabupaten Lampung Barat dalam rangka kewaspadaan dini dan penanganan konflik dengan berkoordinasi bersama Badan Intelegen Daerah, Intelegen Kejari Liwa, Intelegen Kodim 0422/Lampung Barat dan Intelegen Polres Lampung Barat
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Melaksanakan Rapat Koordinasi seluruh usur Fokompimda Kabupaten Lampung Barat yang dilaksanakan per triwulan dan pemberian dana Hibah kepada instansi pemerintah pusat yang meliputi : Polda Lampung, Kodim 0422/LB, Polres LB, Kejari Liwa, Pengadilan Agama Lampung Barat

4.2. Pendanaan Perangkat Daerah

Pendanaan Indikatif merupakan perspektif anggaran dengan strategi kesiapan input pendanaan yang bertujuan menyediakan dukungan finansial yang mencukupi dengan alat pengukur strategis.

Dana indikatif yang diperlukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna mendukung rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 9,648,688,192,-** (*sembilan milyar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah*). Rencana dana indikatif tersebut dialokasikan untuk membiayai 6 program, 13 kegiatan dan 44 sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Demikianlah Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja - PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 ini disusun, selain sebagai pedoman dalam mengemban Tugas Pokok dan Fungsi, Rencana Kerja ini juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Agar Rencana Kerja ini dapat mendatangkan manfaat bagi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat, maka perlu dioperasionalkan dan dalam implementasinya perlu komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi dan konsisten yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh segenap aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

Keberhasilan akan seluruh Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat hanya akan terwujud bila seluruh sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

Liwa, 28 Februari 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



BURLIANTO EKA PUTRA, S.H.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197109241998031005

LAMPIRAN I
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2023
Kabupaten Lampung Barat

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program /Kegiatan / Subkegiatan	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8 = (7 / 6 x 100%)		9 = (7)		10 = (8)		11	12
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
8.01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			37,843,797,572		8,267,150,000		5,234,895,112		63.32		5,234,895,112		63.32		
1	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,45 %	12,006,995,722	75.85 %	2,578,842,000	75.85 %	1,865,293,200	100.00	72.33	75,85 %	1,865,293,200	100.00	72.33	Badan Kesbangpol	
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38 Dokumen	31,243,500	11 Dokumen	3,500,000	11 Dokumen	4,034,000	100.00	115.26	11 Dokumen	4,034,000	100.00	115.26	Badan Kesbangpol	
			Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	20 Dokumen	126,235,200	5 Dokumen	27,200,000	5 Dokumen	13,901,000	100.00	51.11	5 Dokumen	13,901,000	100.00	51.11		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48 Dokumen	92,820,000	12 Dokumen	20,000,000	12 Dokumen	5,665,000	100.00	28.33	12 Dokumen	5,665,000	100.00	28.33		
	8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38 Dokumen	31,243,500	11 Dokumen	3,500,000	11 Dokumen	4,034,000	100.00	115.26	11 Dokumen	4,034,000	100.00	115.26	Badan Kesbangpol	
	8.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	30,166,500	1 Dokumen	6,500,000	1 Dokumen	2,815,000	100.00	43.31	1 Dokumen	2,815,000	100.00	43.31	Badan Kesbangpol	
	8.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Hasil koordinasi penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	23,205,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	2,355,000	100.00	47.10	1 Dokumen	2,355,000	100.00	47.10	Badan Kesbangpol	

8.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	20,884,500	1 Dokumen	4,500,000	1 Dokumen	2,852,000	100.00	63.38	1 Dokumen	2,852,000	100.00	63.38	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokume Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	26,453,700	1 Dokumen	5,700,000	1 Dokumen	2,650,000	100.00	46.49	1 Dokumen	2,650,000	100.00	46.49	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 laporan	25,525,500	2 laporan	5,500,000	2 laporan	3,229,000	100.00	58.71	2 laporan	3,229,000	100.00	58.71	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48 laporan	92,820,000	12 laporan	20,000,000	12 laporan	5,665,000	100.00	28.33	12 laporan	5,665,000	100.00	28.33	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/Bula	8,353,800,000	14Orang/Bula	1,800,000,000	14Orang/Bulan	1,549,477,200	100.00	86.08	14 rang/Bula	1,549,477,200	100.00	86.08	Badan Kesbangpol
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Dokumen	16,243,500	1 Dokumen	3,500,000	1 Dokumen	2,218,000	100.00	63.37	1 Dokumen	2,218,000	100.00	63.37	Badan Kesbangpol
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	8 Dokumen	19,492,200	2 Dokumen	4,200,000	2 Dokumen	3,640,000	100.00	86.67	2 Dokumen	3,640,000	100.00	86.67	Badan Kesbangpol
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8 Dokumen	37,128,000	2 Dokumen	8,000,000	2 Dokumen	4,499,000	100.00	56.24	2 Dokumen	4,499,000	100.00	56.24	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang	8,353,800,000	14 Orang	1,800,000,000	14 Orang	1,549,477,200	100.00	86.08	14 Orang	1,549,477,200	100.00	86.08	Badan Kesbangpol

8.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Dokumen	16,243,500	1 Dokumen	3,500,000	1 Dokumen	2,218,000	100.00	63.37	1 Dokumen	2,218,000	100.00	63.37	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	8 Dokumen	19,492,200	2 Dokumen	4,200,000	2 Dokumen	3,640,000	100.00	86.67	2 Dokumen	3,640,000	100.00	86.67	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8 Dokumen	37,128,000	2 Dokumen	8,000,000	2 Dokumen	4,499,000	100.00	56.24	2 Dokumen	4,499,000	100.00	56.24	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Dokumen	47,291,790	1 Dokumen	10,190,000	1 Dokumen	10,189,500	100.00	100.00	1 Dokumen	10,189,500	100.00	100.00	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	47,291,790	1 Dokumen	10,190,000	1 Dokumen	10,189,500	100.00	100.00	1 Dokumen	10,189,500	100.00	100.00	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	54,541,032	1 Dokumen	11,752,000	1 Dokumen	11,751,000	100.00	99.99	1 Dokumen	11,751,000	100.00	99.99	Badan Kesbangpol
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24 Orang	70,000,000	6 Orang	10,000,000	- Orang	-	-	-	- Orang	-	-	0.00	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	54,541,032	1 Dokumen	11,752,000	1 Dokumen	11,751,000	100.00	99.99	1 Dokumen	11,751,000	100.00	99.99	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas pokok dan fungsinya	24 Orang	70,000,000	6 Orang	10,000,000	- Orang	-	-	0.00	- Orang	-	-	0.00	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	4 Paket	18,749,640	1 Paket	4,040,000	1 Paket	2,163,600	100.00	53.55	1 Paket	2,163,600	100.00	53.55	Badan Kesbangpol

		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	8 Paket	116,025,000	2 Paket	25,000,000	2 Paket	12,670,000	100.00	50.68	2 Paket	12,670,000	100.00	50.68	Badan Kesbangpol
		Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan	28 Dokumen	31,465,980	7 Dokumen	6,780,000	7 Dokumen	5,760,000	100.00	84.96	7 Dokumen	5,760,000	100.00	84.96	Badan Kesbangpol
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 laporan	31,939,362	1 laporan	6,882,000	1 laporan	3,596,000	100.00	52.25	1 laporan	3,596,000	100.00	52.25	Badan Kesbangpol
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	762,507,018	1 laporan	164,298,000	1 laporan	55,070,000	100.00	33.52	1 laporan	55,070,000	100.00	33.52	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	4 Paket	18,749,640	1 Paket	4,040,000	1 Paket	2,163,600	100.00	53.55	1 Paket	2,163,600	100.00	53.55	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	8 Paket	116,025,000	2 Paket	25,000,000	2 Paket	12,670,000	100.00	50.68	2 Paket	12,670,000	100.00	50.68	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan	28 Dokumen	31,465,980	7 Dokumen	6,780,000	7 Dokumen	5,760,000	100.00	84.96	7 Dokumen	5,760,000	100.00	84.96	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 laporan	31,939,362	1 laporan	6,882,000	1 laporan	3,596,000	100.00	52.25	1 laporan	3,596,000	100.00	52.25	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	762,507,018	1 laporan	164,298,000	1 laporan	55,070,000	100.00	33.52	1 laporan	55,070,000	100.00	33.52	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	79 Unit	835,380,000	13 Unit	180,000,000	- Unit	-	-	0.00	- Unit	-	-	0.00	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	322,595,910	1 Unit	69,510,000	- Unit	-	-	0.00	- Unit	-	-	0.00	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	36 Unit	118,809,600	6 Unit	25,600,000	- Unit	-	-	0.00	- Unit	-	-	0.00	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36 Unit	393,974,490	6 Unit	84,890,000	- Unit	-	-	0.00	- Unit	-	-	0.00	Badan Kesbangpol

8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 laporan	9,282,000	1 laporan	2,000,000	1 laporan	1,700,000	100.00	85.00	1 laporan	1,700,000	100.00	85.00	Badan Kesbangpol	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	76,576,500	1 laporan	16,500,000	1 laporan	15,900,000	100.00	96.36	1 laporan	15,900,000	100.00	96.36		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	603,330,000	1 laporan	130,000,000	1 laporan	68,951,400	100.00	53.04	1 laporan	68,951,400	100.00	53.04		
8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	9,282,000	1 laporan	2,000,000	1 laporan	1,700,000	100.00	85.00	1 laporan	1,700,000	100.00	85.00	Badan Kesbangpol	
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	76,576,500	1 laporan	16,500,000	1 laporan	15,900,000	100.00	96.36	1 laporan	15,900,000	100.00	96.36	Badan Kesbangpol	
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	603,330,000	1 laporan	130,000,000	1 laporan	68,951,400	100.00	53.04	1 laporan	68,951,400	100.00	53.04	Badan Kesbangpol	
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	48 Unit	672,945,000	12 Unit	145,000,000	12 Unit	94,107,500	100.00	64.90	12 Unit	94,107,500	100.00	64.90	Badan Kesbangpol	
8.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	442,774,605	5 Unit	95,405,000	5 Unit	79,150,000	100.00	82.96	5 Unit	79,150,000	100.00	82.96	Badan Kesbangpol	
8.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	44,530,395	6 Unit	9,595,000	6 Unit	6,857,500	100.00	71.47	6 Unit	6,857,500	100.00	71.47	Badan Kesbangpol	
8.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	185,640,000	1 Unit	40,000,000	1 Unit	8,100,000	100.00	20.25	1 Unit	8,100,000	100.00	20.25	Badan Kesbangpol	
2	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	95 Persen	2,715,273,600	80 Persen	583,600,000	80 Persen	700,505,600	100.00	120.03	80 Persen	700,505,600	100.00	120.03	Badan Kesbangpol

8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2,000 Orang	1,038,519,000	500 Orang	216,574,000	50 Orang	640,505,800	10.00	295.74	500 Orang	640,505,800	10.00	295.74	Badan Kesbangpol		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1,004 Orang	1,554,254,600	251 Orang	342,026,000	50 Orang	59,999,800	19.92	17.54	251 Orang	59,999,800	19.92	17.54			
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	16 laporan	122,500,000	4 laporan	25,000,000	- laporan	-	-	0.00	- laporan	-	-	0.00			
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinika Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2,000 Orang	1,038,519,000	500 Orang	216,574,000	50 Orang	640,505,800	10.00	295.74	500 Orang	640,505,800	10.00	295.74	Badan Kesbangpol		
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1,004 Orang	1,554,254,600	251 Orang	342,026,000	50 Orang	59,999,800	19.92	17.54	251 Orang	59,999,800	19.92	17.54	Badan Kesbangpol		

	8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	16 laporan	122,500,000	4 laporan	25,000,000	- laporan	-	-	0.00	- laporan	-	-	0.00	Badan Kesbangpol
3	8.01.03	PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase kontribusi peran parpol dalam meningkatkan etika dan budaya politik masyarakat	72 Persen	7,270,588,250	69 Persen	1,514,708,000	69 Persen	815,932,272	100.00	53.87	69 Persen	815,932,272	100.00	53.87	Badan Kesbangpol
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1,982 Orang	1,153,725,000	991 Orang	353,725,000	- Orang	-	-	0.00	- Orang	-	-	0.00	Badan Kesbangpol
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1,880 Orang	1,544,067,500	680 Orang	259,808,500	210 Orang	129,547,500	30.88	49.86	210 Orang	129,547,500	30.88	49.86	Badan Kesbangpol

		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	40 Laporan	4,572,795,750	10 Laporan	901,174,500	10 Laporan	686,384,772	100.00	76.17	10 Laporan	686,384,772	100.00	76.17	Badan Kesbangpol
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1,982 Orang	1,153,725,000	991 Orang	353,725,000	- Orang	-	-	0.00	- Orang	-	-	0.00	Badan Kesbangpol
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1,880 Orang	1,544,067,500	680 Orang	259,808,500	210 Orang	129,547,500	30.88	49.86	210 Orang	129,547,500	30.88	49.86	Badan Kesbangpol

	8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	40 Laporan	4,572,795,750	10 Laporan	901,174,500	10 Laporan	686,384,772	100.00	76.17	10 Laporan	686,384,772	100.00	76.17	Badan Kesbangpol
4	8.01.04	PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Masyarakat yang Terdata dan Aktiv	70 Persen	2,529,345,000	55 Persen	545,000,000	55 Persen	410,043,500	100.00	75.24	55 Persen	410,043,500	100.00	75.24	Badan Kesbangpol
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	4 Dokumen	546,978,978	1 Dokumen	117,858,000	1 Dokumen	29,055,500	100.00	24.65	1 Dokumen	29,055,500	100.00	24.65	Badan Kesbangpol
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	540 Orang	1,644,575,478	135 Orang	354,358,000	23 Orang	380,988,000	17.04	107.51	23 Orang	380,988,000	17.04	107.51	Badan Kesbangpol
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	362 laporan	337,790,544	90 laporan	72,784,000	- laporan	-	-	0.00	- laporan	-	-	0.00	Badan Kesbangpol

	8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	4 Dokumen	546,978,978	1 Dokumen	117,858,000	1 Dokumen	29,055,500	100.00	24.65	1 Dokumen	29,055,500	100.00	24.65	Badan Kesbangpol
	8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	540 Orang	1,644,575,478	135 Orang	354,358,000	23 Orang	380,988,000	17.04	107.51	23 Orang	380,988,000	17.04	107.51	Badan Kesbangpol
	8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	362 laporan	337,790,544	90 laporan	72,784,000	- laporan	-	-	0.00	- laporan	-	-	0.00	Badan Kesbangpol
5	8.01.05	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase menurunnya kasus penyakit masyarakat	74 Persen	6,360,095,000	71 Persen	1,545,000,000	71 Persen	394,178,040	100.00	25.51	71 Persen	394,178,040	100.00	25.51	Badan Kesbangpol
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	368,351,000	1 Dokumen	258,351,000	- Dokumen	-	-	0.00	- Dokumen	-	-	0.00	Badan Kesbangpol

		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4,400 Orang	4,420,115,000	1,100 Orang	952,890,000	40 Orang	185,842,640	3.64	19.50	40 Orang	185,842,640	3.64	19.50	Badan Kesbangpol
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2,000 Orang	1,278,018,000	500 Orang	270,638,000	120 Orang	126,775,000	24.00	46.84	4 Orang	126,775,000	24.00	46.84	Badan Kesbangpol
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	16 laporan	293,611,000	4 laporan	63,121,000	1 laporan	81,560,400	25.00	129.21	1 laporan	81,560,400	25.00	129.21	Badan Kesbangpol
8.01.05.2.01.01	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	368,351,000	1 Dokumen	258,351,000	- Dokumen	-	-	0.00	- Dokumen	-	-	0.00	Badan Kesbangpol

	8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4,400 Orang	4,420,115,000	1,100 Orang	952,890,000	40 Orang	185,842,640	3.64	19.50	40 Orang	185,842,640	3.64	19.50	Badan Kesbangpol
	8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2,000 Orang	1,278,018,000	500 Orang	270,638,000	120 Orang	126,775,000	24.00	46.84	4 Orang	126,775,000	24.00	46.84	Badan Kesbangpol
	8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	16 laporan	293,611,000	4 laporan	63,121,000	1 laporan	81,560,400	25.00	129.21	1 laporan	81,560,400	25.00	129.21	Badan Kesbangpol
6	8.01.06	PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase pencegahan konflik sosial di Kabupaten Lampung Barat	100 %	6,961,500,000	100 %	1,500,000,000	25 %	1,048,942,500	25.00	69.93	25 %	1,048,942,500	25.00	69.93	Badan Kesbangpol

8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	400 Orang	464,100,000	100 Orang	100,000,000	25 Orang	22,000,000	25.00	22.00	25 Orang	22,000,000	25.00	22.00	Badan Kesbangpol
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	44 laporan	928,200,000	11 laporan	200,000,000	11 laporan	17,307,000	100.00	8.65	11 laporan	17,307,000	100.00	8.65	Badan Kesbangpol
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	16 Dokumen	5,569,200,000	4 Dokumen	1,200,000,000	4 Dokumen	1,009,635,500	100.00	84.14	4 Dokumen	1,009,635,500	100.00	84.14	Badan Kesbangpol
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	400 Orang	464,100,000	100 Orang	100,000,000	25 Orang	22,000,000	25.00	22.00	25 Orang	22,000,000	25.00	22.00	Badan Kesbangpol

8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	44 laporan	928,200,000	11 laporan	200,000,000	11 laporan	17,307,000	100.00	8.65	11 laporan	17,307,000	100.00	8.65	Badan Kesbangpol
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	16 Dokumen	5,569,200,000	4 Dokumen	1,200,000,000	4 Dokumen	1,009,635,500	100.00	84.14	4 Dokumen	1,009,635,500	100.00	84.14	Badan Kesbangpol
				37,843,797,572		8,267,150,000		5,234,895,112		63.32		5,234,895,112		63.32	

LAMPIRAN II
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIA TAN	Target Akhir Periode RenstraO PD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OKSASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAW AB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						9.648.688.192,00							9.615.727.320,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						9.648.688.192,00							9.615.727.320,00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat DaerahBadan Kesbangpol (%)				76,05	2.736.831.500,00				5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			3.128.298.820,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						54.447.500,00				5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			61.347.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)				8		(Balik Bukit, Balik					11		
			Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun (Dokumen)				5		(Balik Bukit, Balik					5		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)				12		(Balik Bukit, Balik					12		
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.844.000,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya		4.235.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			11	11	8	(Balik Bukit, Balik Bukit)					11		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan yaitu Renstra, Renja Tahun 2025 (Dokumen)				8	3.844.000,00	(Balik Bukit, Balik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Aparatur				
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						6.112.500,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	Aparatur	7.865.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		4	1	1		(Balik bukit, Balik Bukit)				Aparatur	1		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tahun 2025 (Dokumen)				1	6.112.500,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana			Aparatur			
	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						5.447.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	Aparatur		6.050.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		4	1	1		(Balik Buit, Balik Bukit)				Aparatur	1		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD tahun 2024 (Dokumen)				1	5.447.500,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur			
	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						4.939.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	Aparatur		5.445.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		4	1	1		(Balik Bukit, Balik Bukit)				Aparatur	1		
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tahun 2025				1	4.939.500,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana			Aparatur			
	8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						6.072.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	Aparatur		6.897.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		4	1	1		(Balik Bukit, Balik Bukit)				Aparatur	1		
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Tahun 2024 (Dokumen)				1	6.072.500,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.01.01.2.01.0006	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							6.031.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	Aparatur		6.655.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		5	2	2	(Balik Bukit, Balik Bukit)		Aparatur			2			
			Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2024 (Laporan)				2	6.031.500,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur			
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							22.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	Aparatur		24.200.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		7	12	12	(Balik Bukit, Balik Bukit)		Aparatur			12			
			Penyusunan Evaluasi kinerja perangkat daerah Tahun 2024 (Laporan)				12	22.000.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana			Aparatur			
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1.991.475.000,00				5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			2.196.997.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				14	(Balik Bukit, Balik Bukit)					14			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dokumen)				1	(Balik Bukit, Balik Bukit)					1			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD (Dokumen)				2	(Balik Bukit, Balik Bukit)					2			
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				2	(Balik Bukit, Balik Bukit)					2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							1.977.975.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			2.178.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)			37	14	14		(Balik Bukit, Balik Bukit)						14	
		Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN Badan Kesbangpol Tahun 2024 sejumlah 14 orang (Orang)					14	1.977.975.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur			
8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							3.768.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	Aparatur		4.235.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)			4	1	1		(Balik Bukit, Balik Bukit)					Aparatur	1	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Badan Kesbangpol Tahun 2024 (Dokumen)					1	3.768.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi			Aparatur			
8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							4.480.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	Aparatur		5.082.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)			8	2	2		(Balik Bukit, Balik Bukit)					Aparatur	2	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran Badan Kesbangpol Tahun 2024 (Dokumen)					2	4.480.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur			
8.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							5.252.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	Aparatur		9.680.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)			8	2	2		(Balik Bukit, Balik Bukit)					Aparatur	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol Tahun 2024 (Dokumen)</i>				2	5.252.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur			
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah						11.234.000,00							12.329.900,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			<i>Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Dokumen)</i>				1		(Balik Bukit, Balik Bukit)					1		
	8.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						11.234.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			12.329.900,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)</i>		0	1	1		(Balik Bukit, Balik Bukit)					1		
			<i>Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengadministrasian dalam rangka pengelolaan dan penyusunan kebutuhan barang milik daerah yang ada di Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Barat (Dokumen)</i>				1	11.234.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur			
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						26.832.000,00				5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			34.219.920,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)</i>				1		(Balik Bukit, Balik Bukit)					1		
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)</i>				6		(Balik Bukit, Balik Bukit)					6		
	8.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						12.832.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			14.219.920,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)</i>		0	1	1		(Balik Bukit, Balik Bukit)					1		
			<i>Untuk kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang ada di lingkungan Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Barat</i>				1	12.832.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						14.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	Aparatur		20.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		12	0	6		(Balik Bukit, Balik Bukit)				Aparatur	6		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi bagi Pegawai Badan Kesbangpol (Orang)				6	14.000.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi			Aparatur			
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						226.559.800,00				5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			250.470.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan (Paket)				1		(Balik Bukit, Balik Bukit)					1		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan (Paket)				2		(Balik Bukit, Balik Bukit)					2		
			Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan (Dokumen)				7		(Balik Bukit, Balik Bukit)					7		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)				1		(Balik Bukit, Balik Bukit)					1		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				1		(Balik Bukit, Balik Bukit)					1		
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.431.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			4.888.400,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		51	1	1		(Balik Bukit, Balik Bukit)					1		
			Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Badan Kesbangpol 2024 (Paket)				1	4.431.800,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bangunan			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							27.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	Bangunan		30.250.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		56	2	2		(Balik Bukit, Balik Bukit)		Bangunan Kantor			2			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor Badan Kesbangpol Tahun 2024 (Paket)				2	27.500.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur						
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							6.780.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	Aparatur		8.203.800,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		24	7	7		(Balik Bukit, Balik Bukit)		Aparatur			7			
		Penyediaan SKHU kantor Badan Kesbangpol Tahun 2024 (Dokumen)				7	6.780.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana	Aparatur						
8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							7.568.000,00					Aparatur		8.327.220,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		42	1	1		(Balik Bukit, Balik Bukit)		Aparatur			1			
		Penyediaan makanan dan minuman tamu Kantor Kesbangpol Tahun 2024 (Laporan)				1	7.568.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tamu						
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							180.280.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	Tamu		198.800.580,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		167	1	1		(Balik Bukit, Balik Bukit)		Tamu			1			
		Penyediaan anggaran untuk Perjalanan Dinas baik luar daerah maupun didalam daerah Tahun 2024 (Unit)				1	180.280.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah						188.107.800,00				5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			217.800.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah barang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan (Unit)				22		(Balik Bukit, Balik Bukit)					22		
	8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						69.510.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			84.107.100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		2	0	2		(Balik Bukit, Balik Bukit)					2		
			Pengadaan Kendaraan Dinas untuk operasional Badan Kesbangpol target sebanyak 2 unit (Unit)				2	69.510.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi			Aparatur			
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						26.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	Aparatur		30.976.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		15.00	0.00	10.00		(Balik Bukit, Balik Bukit)				Aparatur	10.00		
			Pengadaan mebel untuk perlengkapan kantor Badan Kesbangpol (Unit)				10	26.800.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur			
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						91.797.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	Aparatur		102.716.900,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		15	0	10		(Balik Bukit, Balik Bukit)				Aparatur	10		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin untuk menunjang kegiatan operasional Badan Kesbangpol (Unit)				10	91.797.800,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi			Aparatur			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						104.596.400,00				5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			179.685.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				1		(Balik Bukit, Balik)					1		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)				1		(Balik Bukit, Balik)					1		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)				1		(Balik Bukit, Balik)					1		
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			2.420.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		4785	1	1		(Balik Bukit, Balik Bukit)					1		
			Penyediaan materai dan jasa pengiriman/ ekspedisi (Laporan)				1	2.200.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana			Aparatur			
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Daya Air dan Listrik						15.840.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	Aparatur		19.965.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		16	1	1		(Balik Bukit, Balik Bukit)				Aparatur	1		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Badan Kesbangpol (Laporan)				1	15.840.000,00	(Balik Bukit, Balik)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur			
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						86.556.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	Aparatur		157.300.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		8.00	1.00	1.00		(Balik Bukit, Balik Bukit)				Aparatur	1.00		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Badan Kesbangpol (Laporan)				1	86.556.400,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana			Aparatur			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12	133.579.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)			5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya		12	175.450.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (Unit)					79.150.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya		5	115.440.050,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		20	5	5		(Balik Bukit, Balik Bukit)							
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Badan Kesbangpol Tahun 2024				5	79.150.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur			
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.554.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	Aparatur		11.609.950,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		27	6	6		(Balik Bukit, Balik Bukit)				Aparatur	6		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya kantor Badan Kesbangpol (Unit)				6	10.554.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peralatan kantor			
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						43.875.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	Peralatan kantor		48.400.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		4.00	1.00	1.00		(Balik Bukit, Balik Bukit)				Peralatan kantor	1.00		
			Pemeliharaan/rehabilitasi gedung/bangunan kantor Kesbangpol (Unit)				1	43.875.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			gedung/bang kantor			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<i>Persentase pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan (Persentase)</i>				85.00	1.283.143.800,00				5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	<i>gedung/bangunan kantor</i>		707.816.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)</i>				500	1.283.143.800,00	<i>(Balik Bukit, Balik Bukit)</i>			5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya		500	707.816.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)</i>				251		<i>(Balik Bukit, Balik)</i>					251		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)</i>				4		<i>(Balik Bukit, Balik)</i>					4		
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)</i>		0	500	500	953.349.800,00	<i>(Balik Bukit, Balik Bukit)</i>		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya		500	277.816.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dilakukan terhadap 230 Orang peserta utusan Aparatur Pemerintah Pusat/Daerah, Aparatur Pekon, Tokoh Masyarakat, Organisasi Wanita, Organisasi Kemasyarakatan, Pemuda, Mahasiswa, Ormas Penggiat Pembangunan Pekon, Kader Pekon, di empat Kecamatan yaitu Batu Brak, Batu Ketulis, Gedung Surian, BNS (Orang)				570	953.349.800,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Pusat/Daerah Aparatur Tokoh Organisasi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, Mahasiswa, Penggiat Pembangunan Pekon, Kader Pekon.			
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						317.794.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	Aparatur Pusat/Daerah Aparatur Tokoh Organisasi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, Mahasiswa, Penggiat Pembangunan Pekon, Kader Pekon.		400.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)		400	251	251		(Balik Bukit, Balik Bukit)				Aparatur Pusat/Daerah Aparatur Tokoh Organisasi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, Mahasiswa, Penggiat Pembangunan Pekon, Kader Pekon.	251		
			Pelatihan bela negara dilakukan 1 kali dalam satu tahun dengan peserta sebanyak satu pleton (31 orang) Sosialisasi dilakukan terhadap 100 Orang peserta yang terdiri atas Tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, aktivis gender, Guru, pemuda, pelajar/mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan Kecamatan Balik Bukit. Diklat TOT dilakukan terhadap 120 Orang peserta yang terdiri atas Tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, aktivis gender, Guru, pemuda, pelajar/mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari di				261	317.794.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Tokoh lintas tokoh aktivis pemuda, pelajar/mahasiswa			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurn Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						12.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	Tokoh lintas tokoh aktivis pemuda, pelajar/maha		30.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurn Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)		0	0	4		(Balik Bukit, Balik				Tokoh lintas tokoh aktivis pemuda, pelajar/maha	4		
			Kegiatan ini merupakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhadap seluruh kegiatan dan sub kegiatan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan BelaNegaraKarakter Bangsa dan Pembaurn Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)				4	12.000.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur			
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						2.105.633.272,00				5. Kehidupan Masyarakat Religius, Aman dan Berbudaya			1.738.212.500,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Persentase kontribusi peran parpol dalam meningkatkan etika dan budaya politik masyarakat (Persentase)				70						Aparatur			
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						2.105.633.272,00				5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			1.738.212.500,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika BudayaPolitik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)				991		(Balik Bukit, Balik					0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang PendidikanPolitik,				700		(Balik Bukit, Balik					250		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<p><i>Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)</i></p> <p><i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)</i></p>				10		(Balik Bukit, Balik					10			
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						800.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya				-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			<p><i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)</i></p>		0.00	0.00	210		(Balik Bukit, Balik Bukit)					0.00			
			<p><i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Politik di Daerah (Orang)</i></p>				210	800.000.000,00	(Balik Bukit, Balik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Anggota Pemilu/Tim Pemilu dan				
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						339.259.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	Anggota Pemilu/Tim Pemilu dan			450.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen) Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang) Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)				1 135 90	599.496.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit) (Balik Bukit, Balik (Balik Bukit, Balik			5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya		1 135 90	659.450.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen) Kegiatan yang dilaksanakan berupa penyusunan buku data base bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat sebanyak 100 eksemplar		5	1	1	129.642.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya		1	142.608.180,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)		500	23	135	389.792.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	Aparatur Aparatur	135	428.773.180,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kegiatan yang dilakukan berupa pembinaan kepada pengurus dan anggota Ormas/LSM yang berada di Kabupaten Lampung Barat dan pemberian dana hibah kepada LSM/Ormas yang ada di Kabupaten Lampung Barat. (Orang)				150	389.792.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Ormas/Aparatur			
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)		0	0	90	80.062.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	Ormas/Aparatur	90	88.068.640,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Kegiatan berupa monitoring dan evaluasi kepada Ormas/LSM/Masjid/Lembaga Pendidikan Swasta yang telah memiliki Surat Tanda Lapor Keberadaan di Kabupaten Lampung Barat (Laporan)				90	80.062.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur			
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase menurunnya kasus penyakit masyarakat (Persentase)				72	1.560.319.620,00				5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	Aparatur		1.566.950.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						1.560.319.620,00				5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			1.566.950.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)				1		(Balik Bukit, Balik					0			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)				1100		(Balik Bukit, Balik					1.100			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)				500		(Balik Bukit, Balik					500			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)				4		(Balik Bukit, Balik					4			
	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						202.271.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya				-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)		0	0	1		(Balik Bukit, Balik Bukit)					0			
			Penyusunan Bahan Perumusan dilaksanakan dalam bentuk kajian akademik dan pemetaan P4GN di Lampung Barat (Dokumen)				1	202.271.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur				
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						942.629.620,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	Aparatur		1.152.250.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)		650	40	1100		(Balik Bukit, Balik Bukit)				Aparatur	1100		
			Pameran produk unggulan dilakukan dalam rangka Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII, pameran ini dilaksanakan 1 kali dalam setahun yang berlokasi TMII Jakarta (Orang)				1.100	942.629.620,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur			
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						275.098.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	Aparatur		337.800.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)		0	4	500		(Balik Bukit, Balik Bukit)				Aparatur	500		
			Deradikalisasi paham radikalisme dilakukan terhadap 20 orang yang terindikasi terpapar pemahaman radikalisme, Deradikalisasi dilakukan selama satu tahun anggaran, di dua Kecamatan yaitu Kec. Sukau dan Kec. Lumbok Seminung				25	275.098.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur			
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pencegahan Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di						140.321.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	Aparatur		76.900.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)		0	1	4		(Balik Bukit, Balik Bukit)				Aparatur	4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kegiatan ini merupakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)				4	140.321.000,00	(Balik Bukit, Balik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur			
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase pencegahan konflik sosial di Kabupaten Lampung Barat (Persentase)				100	1.363.264.000,00				5. Kehidupan Masyarakat Religius, Aman dan Berbudaya	Aparatur		1.815.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)				100	1.363.264.000,00	(Balik Bukit, Balik			5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya		100	1.815.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)				11		(Balik Bukit, Balik					11		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)				4		(Balik Bukit, Balik					4		
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Negara, Fasilitas Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						93.377.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			121.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)		0	25	100		(Balik Bukit, Balik Bukit)					100		
			Melaksanakan kegiatan terkait kewaspadaan dini kepada para Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, di wilayah Kecamatan Air Jitam, Lumbok Seminung, Balik BNS (Orang)				100	93.377.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Tokoh Adat, Agama, Masyarakat, Pemuda			
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						181.651.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	Tokoh Adat, Agama, Masyarakat, Pemuda		242.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)		57	11	11		(Balik Bukit, Balik Bukit)				Tokoh Adat, Agama, Masyarakat, Pemuda	11		
			Melaksanakan kegiatan monitoring dan pemantauan wilayah di Kabupaten Lampung Barat dalam rangka kewaspadaan dini dan penanganan konflik dengan berkoordinasi bersama Badan Intelijen Daerah, Intelijen Kejari Liwa, Intelijen Kodim 0422/Lampung Barat dan Intelijen Polres Lampung Barat				11	181.651.500,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur			
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota						1.088.235.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	Aparatur		1.452.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		12	4	4		(Balik Bukit, Balik Bukit)				Aparatur	4		
			Melaksanakan Rapat Koordinasi seluruh usur Fokompimda Kabupaten Lampung Barat yang dilaksanakan per triwulan dan pemberian dana Hibah kepada instansi pemerintah pusat yang meliputi : Polda Lampung, Kodim 0422/LB, Polres LB, Kejari Liwa, Pengadilan AgamaLampungBarat (Dokumen)				4	1.088.235.500,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur			
			JUMLAH					9.648.688.192,00							9.615.727.320,00	